



PERAN PERUSAHAAN MULTINASIONAL DALAM MEMENGARUHI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG IMIGRASI TENAGA KERJA ASING DALAM MERESPONS PERMASALAHAN AGING POPULATION DI JEPANG

¹Sirwan Yazid Bustami, ²Zulkarnain Zulkarnain, ³Annisa Husnul Khotimah

^{1,2,3}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram

*Surel: sirwan@unram.ac.id

Tanggal pengiriman: 1 September 2024 | Tanggal revisi: 1 Oktober 2024 | Tanggal diterima: 26 Oktober 2024

ABSTRACT

This research aims to analyze role of Japanese multinational corporations in influencing amendments to Foreign Labor Immigration Act in response to shrinking workforce due to aging population in Japan. The role of Japanese multinational corporations is analyzed using a qualitative approach with an analytical descriptive method. Data collection related to role of Japanese multinational corporations was obtained through literature studies and analyzed through several stages, namely data reduction, data presentation, and conclusion drawing. Data reduction was carried out by reviewing data collected to be selected in accordance with analysis of role of Japanese multinational corporations. Furthermore, data analysis was carried out in form of narratives. Finally, conclusion drawing is conducted based on elaboration of concept of interest group and concept of typology of multinational corporations' power to analyze role of Japanese multinational corporations. Based on results of research, role of Japanese multinational corporations in influencing amendments to Foreign Labor Immigration Act is carried out through use of their power capacities, namely instrumental power, structural power, and discursive power. Instrumental power is exercised through Keidanren's influence by means of political lobbying, advocacy, consultation, and use of membership networks to create collective pressure on Japanese government. Meanwhile, structural power is exercised through centrality of multinational corporations in Japan's economic development, resulting in government's dependence on their investments and innovations and thus changing foreign labor immigration policies. Finally, discursive power is exercised through Keidanren's influence in constructing discourse of foreign labor immigration as a solution to shrinking workforce due to aging population.

Keywords: Keidanren, Immigration Policy, Instrumental Power, Structural Power, Discursive Power

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perusahaan multinasional Jepang dalam memengaruhi amandemen Undang-Undang Imigrasi Tenaga Kerja Asing dalam merespons penyusutan tenaga kerja akibat *aging population* di Jepang. Peran perusahaan multinasional Jepang dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pengumpulan data terkait peran perusahaan multinasional Jepang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan cara menelaah data yang dikumpulkan untuk diseleksi sesuai dengan analisis peran perusahaan multinasional Jepang. Selanjutnya, dilakukan analisis data dalam bentuk narasi. Terakhir, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pada elaborasi konsep kelompok kepentingan dan konsep tipologi *power* perusahaan multinasional untuk menganalisis peran perusahaan multinasional Jepang. Berdasarkan hasil penelitian, peran perusahaan multinasional Jepang dalam memengaruhi

amandemen Undang-Undang Imigrasi Tenaga Kerja Asing dilakukan melalui penggunaan kapasitas *power* yang dimiliki, yakni kekuasaan instrumental, kekuasaan struktural, dan kekuasaan diskursif. Kekuasaan instrumental dijalankan melalui pengaruh *Keidanren* dengan cara lobi politik, advokasi, konsultasi, dan penggunaan jejaring keanggotaan untuk menciptakan tekanan kolektif terhadap pemerintah Jepang. Sedangkan, kekuasaan struktural dijalankan melalui sentralitas perusahaan multinasional dalam pembangunan ekonomi Jepang berdampak pada ketergantungan pemerintah atas investasi dan inovasi mereka sehingga mampu mengubah kebijakan imigrasi tenaga kerja asing. Terakhir, kekuasaan diskursif dijalankan melalui pengaruh *Keidanren* dalam mengonstruksi diskursus imigrasi tenaga kerja asing sebagai solusi atas penyusutan tenaga kerja akibat *aging population*.

Kata Kunci: *Keidanren*, Kebijakan Imigrasi, Kekuasaan Instrumental, Kekuasaan Struktural, Kekuasaan Diskursif

LATAR BELAKANG

Sejak era globalisasi, perusahaan multinasional (*multinational corporation*, MNC) Jepang memainkan peran sentral dalam ekonomi global melalui inovasi teknologi dan praktik manajemen bisnis yang efisien. Sejarah perkembangan MNC Jepang dimulai sejak periode Kekaisaran Meiji (1868–1912), di mana reformasi ekonomi dilakukan secara besar-besaran untuk mendorong industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Hal ini menjadikan Jepang sebagai salah satu negara pionir utama yang melakukan investasi asing langsung (*foreign direct investment*, FDI) melalui keberadaan MNC mereka. Perusahaan-perusahaan elektronik dan otomotif Jepang seperti Toyota, Honda, Sony, Nissan, dan Mitsubishi memiliki kehadiran global yang signifikan dan memainkan peran penting dalam perekonomian dunia. Tak ayal hal ini mengukuhkan perekonomian Jepang sebagai salah satu yang terkuat di dunia setelah Amerika Serikat (AS). Klaim ini diperkuat dengan data yang diakses melalui situs CEIC Data, produk domestik bruto (*gross domestic product*, GDP) Jepang tahun 2019 dan produk domestik bruto per kapita sekitar USD 40.809,812 serta tabungan bruto nasional sebesar 28,9% dari GDP. Pada tahun 1980-an merupakan masa kejayaan bagi industri otomotif dan elektronik Jepang. Pada tahun itu terjadi surplus dari ekspor otomotif dan barang elektronik Jepang ke Eropa dan Amerika Serikat (Kensy, 2001).

Jepang dikenal sebagai negara industri manufaktur dengan ragam inovasi di segala bidang komponen. Dari sekian banyak industri yang saham kepemilikannya dimiliki oleh Jepang, industri otomotif merupakan yang terbesar di Jepang. Melalui industri otomotif ini Jepang banyak mendapatkan keuntungan sekaligus efektif dalam meningkatkan GDP Jepang melalui kegiatan perdagangan internasional. Per tahun 2012, MNC otomotif terbesar Jepang memperoleh sebagian besar penjualannya dari anak perusahaan di luar negeri dengan distribusi persentase 64% untuk Toyota, 81% untuk Honda, dan 78% untuk Nissan (Fitzgerald, 2023). Hal ini menjadikan Jepang sebagai negara dengan pengaruh ekonomi yang kuat di dunia. MNC Jepang memiliki banyak sekali cabang di berbagai negara dan umumnya mereka bergerak secara berkelompok. Secara umum, MNC Jepang mendeklarasikan keberadaannya melalui hubungan dengan perusahaan-perusahaan lain yang dikenal sebagai *Keiretsu* (Kensy, 2001).

Keiretsu merupakan kelompok perusahaan yang saling bergantung, masing-masing memiliki mitra perbankan, produsen, distributor, dan mitra rantai pasokannya sendiri. Pasca Perang Dunia II, *Keiretsu* bertransformasi menjadi kelompok jaringan kemitraan dominan yang mendorong perkembangan bisnis dan ekonomi modern di Jepang. Dalam sistem *Keiretsu*, MNC Jepang telah menjadi salah satu kelompok kepentingan utama dalam ekonomi global. Sebagai entitas yang beroperasi di berbagai negara dan industri, mereka tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) Jepang, tetapi juga terhadap perekonomian dunia (Widarahesty & Ayu, 2014). Mereka memainkan peran vital dalam transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan penetapan standar industri. Selain itu kelompok tersebut memiliki kemampuan untuk memengaruhi kebijakan ekonomi, regulasi perdagangan, dan praktik bisnis internasional. Pengaruh mereka juga terlihat dalam penentuan arah kebijakan perdagangan Jepang, di mana pemerintah Jepang sering kali mempertimbangkan kepentingan MNC untuk

menjaga daya saing global. Dengan demikian MNC berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan bisnis dan kebijakan luar negeri, sekaligus memainkan peran strategis dalam membentuk interaksi global dan mempromosikan agenda ekonomi internasional negara asalnya (Frendy, 2022; Yaginuma, 1993).

Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Jepang menghadapi tantangan demografis yang cukup serius, yaitu *aging population*. Fenomena ini menimbulkan berbagai implikasi terhadap keberlanjutan ekonomi negara dan operasi MNC tersebut. Dilansir dari media Statista, pada tahun 2022, penduduk berusia 65 tahun ke atas di Jepang berjumlah sekitar 29,9% dari total populasi Jepang. Berdasarkan proyeksi *National Institute of Population and Social Security Research* pada tahun 2036, satu dari tiga orang di Jepang akan berusia lanjut, yaitu 65 tahun ke atas, yang artinya proporsi generasi lanjut usia akan terus meningkat selama 50 tahun ke depan. Dengan menggunakan data demografi pada tahun 2014–2015, Jepang mengalami kemunduran demografis menuju kepunahan nasional (*National Institute of Population and Social Security Research*, 2010).

Salah satu dampak dari fenomena *aging population* di Jepang adalah adanya *shrinking workforce* atau penyusutan tenaga kerja yang sangat berpengaruh bagi produktivitas dan daya saing ekonomi suatu negara. Meningkatnya generasi lanjut usia di Jepang sejalan dengan penurunan angkatan kerjanya yang merupakan faktor utama dalam produksi dari sektor industri Jepang. Kecenderungan demografis ini akan berdampak buruk bagi GDP riil sekitar 15% dalam 40 tahun ke depan. Selain karena *aging population*, rendahnya tingkat kesuburan di Jepang semakin menghambat pemenuhan akan tenaga kerja di Jepang. Pada tahun 2015 Jepang belum mampu untuk memenuhi permintaan pekerja dengan 125 pekerjaan untuk setiap 100 pencari kerja. Hal ini berimbas pada perusahaan manufaktur yang khususnya bergerak pada industri otomotif dan elektronik. Kurangnya tenaga kerja menghambat keberlanjutan produksi perusahaan dan akan berimplikasi negatif bagi

perekonomian Jepang di tengah ketidakpastian pasar global (Colacelli & Corugedo, 2018).

Penyusutan tenaga kerja dengan usia produktif di Jepang akan memengaruhi produktivitas bisnis MNC. Maka dari itu, pemerintah Jepang mempertimbangkan kebijakan dengan memperhatikan dampaknya terhadap keberadaan MNC mereka. Kementerian Kehakiman Jepang mulai menulis ulang peraturan terkait status penduduk tetap pada tahun 2017 sehingga memperpendek jangka waktu bagi orang asing untuk mengajukan permohonan. Setelah lima tahun bekerja sebagai pekerja berkualifikasi tinggi (*specified skilled workers, SSW*), warga negara asing dapat mengajukan permohonan kartu penduduk tetap mulai Maret 2017. Berdasarkan UU baru, yang mengakui kualifikasi yang dimiliki oleh tenaga profesional asing, izin tinggal permanen dapat diperoleh setelah tiga tahun kerja, atau dalam kasus tertentu dikabulkan jika persyaratan terpenuhi sekalipun dalam jangka waktu 1 tahun. Namun, pada tahun 2018, pemerintah Jepang mengamendemen Undang-Undang Pengendalian Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi (*Immigration Control and Refugee Recognition Act*) melalui Diet (*National Diet of Japan*), yang mengizinkan pekerja asing untuk melakukan pekerjaan manual, yang sebelumnya setidaknya secara resmi, ilegal ke dalam dunia kerja. Sebuah program yang dikenal sebagai Profesional Asing Berketerampilan Tinggi (*Highly Skilled Foreign Professionals, HSFP*), atau visa tipe 1, diperkenalkan berdasarkan rencana kebijakan dengan tujuan untuk merekrut ilmuwan, peneliti, insinyur, dan pemilik bisnis (Sholihin, 2022).

Pemerintah Jepang berencana mengubah undang-undang (UU) tersebut guna mengizinkan 345.000–350.000 warga negara asing (WNA) memasuki Jepang selama lima tahun ke depan. Diperkirakan sekitar 60.000 orang akan dipekerjakan di perusahaan pemeliharaan, 53.000 di sektor jasa makanan, 40.000 di sektor konstruksi, 37.000 di pembersihan gedung, 36.500 di sektor pertanian, 34.000 di sektor produksi makanan dan minuman, dan 22.000 di sektor perhotelan. Kebijakan tersebut juga

mensyaratkan pengajaran bahasa Jepang di samping penyesuaian yang berkaitan dengan komunitas asing (Sholihin, 2022).

Perubahan UU imigrasi ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang sejalan dengan kondisi kekurangan tenaga kerja yang dialami oleh MNC di Jepang sebagai dampak dari *aging population* di Jepang. Berbagai sektor industri yang tercatat mengalami kekurangan tenaga kerja secara berturut-turut berdasarkan data pada tahun 2023 adalah industri kesehatan, industri konstruksi, industri transportasi, industri ilmu pengetahuan dan teknologi, industri komunikasi, dan industri manufaktur (Statista, 2023). Kekurangan tenaga kerja yang dihadapi oleh MNC di Jepang memberikan dampak buruk karena terhambatnya operasional dan produktivitas perusahaan. Situasi semacam ini secara makroekonomi juga memengaruhi perekonomian Jepang yang mengalami stagnasi dalam beberapa dekade terakhir. Kondisi ini memaksa mereka harus menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan krisis ketenagakerjaan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh mayoritas MNC di Jepang adalah dengan menaikkan upah tenaga kerja yang bertujuan untuk menarik minat tenaga kerja dan memperpanjang usia pensiun meskipun cara tersebut tidak mampu mengatasi situasi krisis ketenagakerjaan di Jepang (Kajimoto, 2022). Upaya berikutnya yang ditempuh oleh MNC dalam mengatasi permasalahan ini adalah dengan mengandalkan penerimaan tenaga kerja asing. Dalam melakukan upaya tersebut, MNC membutuhkan peran pemerintah Jepang melalui regulasi dan kebijakan yang pro terhadap penerimaan tenaga kerja asing (Ganelli, 2015).

Berdasarkan peran sentral yang dimiliki oleh MNC dalam perekonomian makro Jepang, MNC berupaya mengatasi permasalahan ini dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah dalam menciptakan regulasi ketenagakerjaan yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan krisis tenaga kerja. Begitu juga sebaliknya, dalam pengambilan keputusan amandemen UU Imigrasi Tenaga Kerja Asing,

kebijakan pemerintah Jepang dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan dan rekomendasi yang diberikan oleh MNC dalam upaya mengatasi permasalahan krisis tenaga kerja (Ganelli, 2015).

Amandemen ini menimbulkan pelbagai reaksi dan adaptasi dalam masyarakat Jepang. Integrasi sosial pekerja asing menjadi tantangan yang paling krusial dan fokus utama karena berkaitan langsung dengan bahasa, budaya, dan harmonisasi di tempat kerja. Meskipun demikian, keberadaan pekerja asing juga membawa berbagai kontribusi positif dalam memperkaya keragaman budaya dan meningkatkan kesadaran global di kalangan masyarakat Jepang. Namun, ada juga kekhawatiran tentang potensi ketegangan sosial atau diskriminasi terhadap pekerja asing, terutama di daerah yang kurang terbiasa dengan multikulturalisme atau dalam sektor pekerjaan yang lebih tradisional. Pemerintah dan masyarakat Jepang terus berusaha untuk mengatasi tantangan ini melalui pendekatan yang inklusif dan program integrasi yang diselaraskan (NHK World Japan, 2018).

Secara politis, amandemen ini mencerminkan respons pemerintah terhadap tekanan dari sektor bisnis, termasuk MNC, untuk memodernisasi kebijakan imigrasi guna meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja. Langkah ini juga dapat memengaruhi pandangan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal kebijakan imigrasi, seiring dengan kekhawatiran beberapa kelompok masyarakat tentang dampak jangka panjang dari peningkatan jumlah pekerja asing terhadap budaya masyarakat Jepang (Davison & Peng, 2021).

Berdasarkan elaborasi permasalahan di atas, penelitian ini merumuskan pokok permasalahan, yakni “Bagaimana peran MNC Jepang dalam memengaruhi amandemen UU Imigrasi Tenaga Kerja Asing dalam merespons permasalahan *aging population* di Jepang?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keterlibatan MNC Jepang dalam memengaruhi amandemen UU Imigrasi Tenaga

Kerja Asing seiring penurunan produktivitas bisnis mereka karena penyusutan tenaga kerja akibat *aging population* di Jepang.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Sejumlah literatur akademis mengulas permasalahan *aging population* dan kebijakan imigrasi Jepang terkait tenaga kerja asing. Beragam perspektif digunakan untuk menyorot kompleksitas permasalahan ini baik secara ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan hubungan internasional. *Pertama*, artikel berjudul “*High-Skill Migration, Multinational Companies, and the Location of Economic Activity*” ditulis oleh Nicolas Morales membahas kompleksitas hubungan MNC dan isu migrasi dalam tatanan ekonomi global. MNC sering kali mengandalkan imigran terampil untuk mentransfer pengetahuan, memfasilitasi komunikasi lintas batas, dan meningkatkan efisiensi produksi. Selain itu, migrasi juga dapat memainkan peran penting dalam menjembatani kesenjangan antara perusahaan induk dan afiliasi asing, sehingga memfasilitasi proses produksi global. Di sisi lain, keputusan MNC untuk mempekerjakan pekerja imigran juga dapat berimplikasi pada kebijakan imigrasi, hubungan perdagangan, dan kegiatan investasi asing langsung (Morales, 2023).

Kedua, artikel Giampaolo Lanzieri yang berjudul “*Long-term Contribution of Migration in Ageing Populations: Japan Compared with Europe*”. Tulisan ini menggarisbawahi peran penting migrasi dalam membentuk lanskap demografi Jepang dan Eropa. Dengan menganalisis tren migrasi di masa lalu dan proyeksi migrasi, penelitian ini menyoroti dampak signifikan migrasi terhadap dinamika populasi, dengan menekankan potensi migrasi untuk melawan penurunan populasi dan penuaan. Penelitian ini menekankan pentingnya mempertimbangkan migrasi sebagai pengungkit demografi utama, juga membahas implikasi dari berbagai skenario migrasi terhadap komposisi penduduk di masa depan, dan menekankan

perlunya keputusan kebijakan yang tepat untuk memperoleh manfaat dari keimigrasian sekaligus mengatasi tantangan integrasi sosial (Lanzieri, 2013).

Ketiga, artikel Ichiro Muto, Takemasa Oda, dan Nao Sudo yang berjudul *“Macroeconomic Impact of Population Aging in Japan: A Perspective from an Overlapping Generation Models”* mengulas dampak perubahan demografis, seperti migrasi terhadap MNC dan ekonomi global. Dalam ekonomi terbuka yang kecil, penurunan tingkat kesuburan dapat menyebabkan rumah tangga mengakumulasi aset luar negeri, mengurangi investasi domestik dan meningkatkan neraca perdagangan dalam jangka pendek. Namun, dalam jangka panjang, arus modal keluar dapat menurunkan produksi domestik dibandingkan dengan pendapatan nasional bruto (PNB). Arus masuk pendapatan positif dari luar negeri dapat mengurangi dampak buruk dari perubahan demografi terhadap produksi domestik, yang mengarah ke PNB per kapita yang lebih besar dalam lingkungan ekonomi terbuka. Interaksi ini menyoroti keterkaitan antara migrasi, MNC, dan ekonomi global, yang menekankan pentingnya mempertimbangkan pergeseran demografi dalam analisis ekonomi (Muto et al., 2016).

Keempat, artikel Hidayati Dwi Kusuma Pratiwi yang berjudul *“Kebijakan Pengendalian Imigrasi Sebagai Opsi Strategis Terhadap Fenomena Penuaan Populasi di Jepang”* mengulas kombinasi dari faktor ekonomi, budaya, dan hubungan internasional berpengaruh terhadap penerapan kebijakan imigrasi di Jepang. Kombinasi dari ketiga faktor tersebut yang menyebabkan pemerintah Jepang melakukan kebijakan pengendalian imigrasi di Jepang. Terkait membahas faktor ekonomi, ketika perekonomian Jepang mengalami keterpurukan yang disebabkan oleh resesi ekonomi pada tahun 2008. Jepang membuat program *“pay-to-go”* sebagai upaya untuk mengurangi jumlah imigran yang tidak bermata pencaharian karena banyak *nikkeijin* yang menjadi pengangguran setelah terjadi resesi ekonomi. Dalam faktor budaya terkait dengan adanya globalisasi dan westernisasi mengakibatkan

adanya kebangkitan dari nasionalisme kultural yang melekat di Jepang menghasilkan literatur *nihonjinron* yang sangat menekankan beberapa prinsip dasar seperti homogenitas, darah, kompetensi budaya, dan partisipasi sosial sehingga masyarakat dan pemerintah Jepang melakukan upaya untuk membatasi imigrasi karena ingin tetap menjadi masyarakat yang homogen serta menjaga nilai-nilai kultural Jepang. Sedangkan dalam faktor hubungan internasional, dengan melihat dampak perang dari Jepang yang kehilangan banyak koloninya mengakibatkan pemerintah Jepang membatasi imigran yang lebih cenderung memilih pekerja imigran temporer dibandingkan dengan imigran permanen, dikarenakan pemerintah Jepang mewaspadai ancaman eksternal (Pratiwi, 2014).

Kelima, artikel berjudul "*Population Aging and Immigration in Japan*" yang ditulis oleh Naohiro Ogawa mengulas dampak imigrasi dalam mengurangi *aging population* di Jepang memiliki banyak segi dan memiliki manfaat potensial untuk mengatasi tantangan demografi. Dengan menarik pekerja asing, Jepang dapat mengurangi kekurangan tenaga kerja, terutama di sektor-sektor yang memiliki permintaan tinggi untuk pekerja terampil dan tidak terampil. Para imigran dapat berkontribusi pada tenaga kerja, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan program kesejahteraan sosial. Selain itu, imigrasi dapat menyuntikkan keragaman ke dalam *aging population*, mendorong pertukaran antar budaya dan berpotensi mengurangi ketegangan sosial dan ekonomi yang terkait dengan masyarakat yang menua dengan cepat. Merangkul imigrasi sebagai opsi kebijakan strategis dapat membantu Jepang menangkal dampak penuaan populasi dengan menambah angkatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mendorong masyarakat yang lebih dinamis dan inklusif (Ogawa, 2011).

Penelitian ini berupaya menganalisis keterlibatan MNC dalam memengaruhi proses amandemen UU imigrasi Jepang terkait tenaga kerja asing seiring berkembangnya fenomena *aging population* yang berdampak pada berkurangnya

produktivitas ekonomi Jepang akibat penyusutan tenaga kerja domestik. Keterlibatan MNC dianalisis berdasarkan *power* yang dimiliki dalam memengaruhi perubahan kebijakan imigrasi bagi tenaga kerja asing yang dianggap berperan penting dalam menyokong keberlanjutan bisnis MNC Jepang.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah diajukan oleh penulis pada bagian pendahuluan, penelitian ini menggunakan konsep kelompok kepentingan menurut perspektif neoliberal dengan mengasumsikan MNC sebagai sebuah kelompok kepentingan yang memiliki motif tersendiri sehingga turut mengambil peran dalam memengaruhi amandemen kebijakan kontrol imigrasi terkait ketenagakerjaan di Jepang. Berikutnya, penulis menggunakan konsep tipologi *power* perusahaan multinasional dalam menganalisis keterlibatan MNC Jepang dalam memengaruhi amandemen kebijakan kontrol imigrasi terkait ketenagakerjaan sebagai upaya pemerintah Jepang dalam mengatasi permasalahan *aging population*.

Konsep Kelompok Kepentingan

Konsep kelompok kepentingan mengacu kepada sekelompok individu atau organisasi yang memiliki kepentingan bersama dalam isu tertentu dan berusaha untuk memengaruhi kebijakan publik yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Kelompok kepentingan dapat berasal dari berbagai latar belakang, seperti bisnis, masyarakat sipil, profesi, atau sektor non-profit. Mereka sering kali berupaya memengaruhi proses pembuatan keputusan pemerintah atau lembaga lainnya agar kepentingan mereka dapat diakomodasi atau dilindungi. Salah satu aspek penting dari konsep kelompok kepentingan adalah bahwa mereka beroperasi di luar struktur formal pemerintahan, namun sering kali memiliki akses yang signifikan ke dalamnya. Mereka dapat menggunakan berbagai strategi untuk memengaruhi

kebijakan, termasuk advokasi langsung kepada pejabat publik, lobi, kampanye media, dan mobilisasi massa. Keberhasilan kelompok kepentingan dalam memengaruhi kebijakan sering kali bergantung pada kekuatan mereka dalam mengorganisasi sumber daya finansial dan dukungan publik (Garceau, 2015).

MNC kerap kali dianggap sebagai suatu entitas atau kelompok kepentingan yang memberikan pengaruh signifikan dalam kontestasi perekonomian global. MNC juga sejatinya mampu memberikan implikasi khususnya dalam perekonomian suatu negara. Mereka berkontribusi terhadap GDP melalui investasi, produksi, dan ekspor. Secara makroekonomi, MNC diposisikan sebagai kelompok kepentingan yang fundamental bagi stabilitas pertumbuhan ekonomi negara. Mereka dapat memberikan pengaruh dalam kebijakan publik, seperti terlibat dalam lobi dan advokasi dalam memengaruhi kebijakan publik yang tentunya dapat mendukung kepentingan bisnis mereka (Isaac et al., 2020).

Konsep kelompok kepentingan digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan MNC sebagai suatu kelompok yang memiliki kepentingan bisnis dalam kaitannya dengan permasalahan krisis tenaga kerja yang berdampak buruk terhadap produktivitas bisnis mereka. Sehingga mereka perlu mengambil langkah strategis sebagai upaya memenuhi kepentingan bisnis mereka terkait penyelesaian permasalahan krisis tenaga kerja melalui amandemen UU Imigrasi Tenaga Kerja Asing yang dilakukan oleh pemerintah Jepang.

Konsep Tipologi *Power* Perusahaan Multinasional

John Ruggie, dalam tulisan berjudul "*Multinationals as Global Institution: Power, Authority and Relative Autonomy*", mengelompokan jenis kekuasaan atau *power* yang digunakan oleh MNC untuk mencapai kepentingannya menjadi tiga jenis, yaitu kekuasaan instrumental (*instrumental power*), kekuasaan struktural (*structural power*), dan kekuasaan diskursif (*discursive power*). *Pertama*, kekuasaan instrumental. Dalam

konteks bisnis internasional, tipologi kekuasaan ini mengacu pada kekuasaan yang dimiliki oleh MNC yang mencakup pemanfaatan beberapa elemen seperti sumber daya, otoritas, dan kontrol yang berguna untuk mencapai kepentingan mereka. Salah satu bentuk upaya yang sering kali dilakukan dalam memengaruhi entitas politik adalah dengan melakukan lobi (*lobbying*). Tindakan ini ditujukan melobi entitas politik di negara tuan rumah (*host country*) yang notabene merupakan negara-negara berkembang. Upaya lobi dilakukan dalam bentuk kontribusi atas kegiatan kampanye politik, asimetris dalam pengetahuan, dan usaha untuk memperoleh akses khusus untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan (Ruggie, 2018).

Kedua, kekuasaan struktural. Tipologi kekuasaan ini mengacu pada kekuasaan yang dimiliki oleh MNC akibat kompleksnya struktur organisasi yang tersebar luas pada berbagai negara. Kekuasaan struktural didasarkan oleh faktor-faktor atas sumber daya, otoritas manajerial, dan kekuatan dalam pengambilan keputusan strategis. Sama halnya dengan kekuasaan instrumental, kekuasaan struktural juga digunakan oleh MNC untuk memengaruhi keputusan kebijakan. Hanya saja dalam praktiknya, mereka tidak melakukan upaya-upaya untuk melobi atau mendekati entitas politik untuk dipengaruhi, melainkan menggunakan pendekatan yang koersif dengan memanfaatkan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, sumber daya yang ditawarkan oleh MNC untuk kemudian dijadikan alat dalam bernegosiasi dengan pemerintah *host country* guna mencapai kepentingan mereka. Begitu banyaknya opsi wilayah yang dapat dijadikan tempat untuk berinvestasi oleh MNC menjadi salah satu pertimbangan yang muncul bagi negara-negara berkembang sebagai *host country* untuk bersaing dalam mendatangkan investasi asing ke negara mereka. Hal tersebut menjadikan MNC memiliki posisi yang lebih dominan karena banyaknya negara-negara berkembang yang ingin menarik mereka untuk menginvestasikan modal mereka yang dimanfaatkan untuk meneken perjanjian

yang lebih menguntungkan terkait investasi dan peraturan perdagangan bebas (Ruggie, 2018).

Terakhir, kekuasaan diskursif. Berbeda dengan kedua tipologi *power* sebelumnya, kekuasaan diskursif memfokuskan penggunaan kekuasaan terhadap entitas politik atau pemerintah. Secara praktis, kekuasaan jenis ini mengacu pada pemanfaatan narasi masyarakat yang dibentuk melalui doktrin terhadap pemahaman terkait topik-topik yang relevan dengan kepentingan MNC. Secara sederhana, kekuasaan diskursif merupakan kemampuan untuk memengaruhi hasil melalui pembangunan gagasan, penetapan norma dan harapan sosial, serta pembentukan identitas. Hal tersebut dapat dicapai melalui penggunaan media, kampanye pemasaran, dan penciptaan narasi yang menguntungkan dan seumpama berhasil akan menjadikan MNC dipandang sebagai *volunteer* dalam menegakkan keadilan ekonomi oleh masyarakat (Ruggie, 2018).

Maka dari itu, dengan menggunakan konsep tipologi *power* MNC, penelitian ini berupaya menganalisis peran MNC Jepang melalui pemanfaatan kekuasaan yang dimiliki dalam memengaruhi perubahan kebijakan imigrasi tenaga kerja asing melalui amandemen UU Kontrol Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi guna mencapai kepentingan bisnis dalam konteks pemenuhan tenaga kerja asing seiring kegawatdaruratan *aging population* di Jepang.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis untuk mengkaji peran MNC dalam memengaruhi perubahan kebijakan kontrol imigrasi bagi tenaga kerja asing merespons krisis ketenagakerjaan akibat *aging population* di Jepang. Metode deskriptif analitis bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis dan terperinci serta menganalisis data yang diperoleh untuk menemukan hubungan dan pola yang relevan (Creswell & Creswell, 2022). Data

dikumpulkan melalui sumber sekunder seperti artikel jurnal, buku, artikel periodik, publikasi lembaga internasional dan pemerintah Jepang, dan data statistik tenaga kerja asing di Jepang. Sumber data ini dipilih untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai peran MNC dalam memengaruhi kebijakan kontrol imigrasi terhadap tenaga kerja asing serta dampaknya terhadap pasar tenaga kerja di Jepang.

Proses tahapan penelitian dimulai dengan tahap persiapan, di mana peneliti merumuskan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan menyusun kerangka konseptual terlebih dahulu. Tahap berikutnya adalah pengumpulan data, dengan melakukan pencarian dan pengumpulan sumber data yang relevan, baik dari publikasi resmi maupun dari literatur akademis. Setelah data terkumpul, selanjutnya memasuki tahap analisis dan pengolahan data. Tahap terakhir adalah interpretasi dan penarikan kesimpulan, di mana hasil analisis data digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian sehingga mampu memaparkan wawasan analitis mengenai peran MNC dalam memengaruhi perubahan kebijakan kontrol imigrasi bagi tenaga kerja asing merespons krisis ketenagakerjaan akibat *aging population* di Jepang (Miles et al., 2014).

DISKUSI

***Aging Population* dan Krisis Ketenagakerjaan di Jepang**

MNC telah menjadi kekuatan ekonomi yang fundamental di berbagai negara, termasuk di Jepang, dengan peran yang kompleks dalam memengaruhi kebijakan pemerintah dan dinamika ekonomi secara luas. Sebagai kelompok kepentingan, MNC tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan inovasi, tetapi juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi regulasi dan kebijakan yang mengatur lingkungan bisnis di negara tuan rumah (*host country*). Di Jepang, khususnya, MNC memiliki peran yang penting dalam membentuk arah

ekonomi dan teknologi, sekaligus memengaruhi respons pemerintah terhadap tantangan seperti fenomena *aging population* (Fauzan & Paramasatya, 2022).

MNC menghadirkan FDI yang signifikan terhadap ekonomi Jepang, yang tidak hanya mencakup modal finansial tetapi juga teknologi dan manajemen yang canggih. Keberadaan mereka mendorong pertumbuhan sektor industri tertentu dan menciptakan lapangan kerja, yang pada gilirannya membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja yang diakibatkan oleh penuaan populasi. Sebagai contoh, MNC elektronik dan otomotif seperti Sony dan Toyota telah menjadi tulang punggung industri Jepang, tidak hanya dalam hal produksi dan penjualan tetapi juga dalam menetapkan standar untuk inovasi teknologi global (Kim & Milner, 2021).

Selain itu, MNC sering kali memiliki pengaruh yang signifikan dalam merumuskan kebijakan pemerintah terkait dengan investasi, regulasi lingkungan, dan perpajakan. Dengan memiliki akses ke sumber daya finansial yang besar dan kemampuan untuk membawa teknologi canggih, mereka dapat memengaruhi proses legislasi di Parlemen dan mengadvokasi kepentingan mereka dalam diskusi kebijakan. Misalnya, MNC dalam sektor manufaktur berupaya mendorong pemerintah untuk mengadopsi regulasi yang mendukung kegiatan industri mereka, sedangkan MNC dalam sektor teknologi berusaha memengaruhi kebijakan perlindungan data atau regulasi teknologi (Kim & Milner, 2021).

Namun demikian, peran MNC tidak selalu berdampak positif secara langsung. Kritik sering kali mengarah pada ketidaksetaraan dalam distribusi keuntungan ekonomi, di mana MNC dapat memperoleh keuntungan yang signifikan tanpa kontribusi yang proporsional terhadap masyarakat lokal atau lingkungan. Selain itu, hal ini juga bergantung pada kebijakan yang diusulkan atau diadopsi, ada risiko bahwa kepentingan jangka pendek mereka kemungkinan besar bertentangan

dengan kepentingan jangka panjang masyarakat atau keberlanjutan lingkungan (Kim & Milner, 2021).

Krisis ketenagakerjaan yang diderita oleh Jepang menempatkan MNC pada posisi sentral dalam membentuk kebijakan imigrasi di Jepang, terutama dalam konteks mengatasi kekurangan tenaga kerja yang semakin meningkat akibat fenomena *aging population*. Sebagai pemain utama dalam perekonomian global, MNC Jepang tidak hanya membawa investasi dan teknologi canggih ke Jepang, tetapi juga memengaruhi kebijakan pemerintah terkait dengan penerimaan pekerja asing. Salah satu manuver mereka dalam memengaruhi kebijakan imigrasi adalah melalui pemenuhan tenaga kerja terampil dari luar negeri. MNC sering menghadapi kesulitan dalam mempekerjakan buruh dengan keterampilan khusus atau teknis tertentu di pasar tenaga kerja dalam negeri seiring semakin menyusutnya jumlah tenaga kerja produktif karena *aging population*. Sebagai respons, mereka memengaruhi pemerintah untuk merelaksasi aturan dan kebijakan imigrasi atau memperkenalkan visa khusus yang memfasilitasi kedatangan pekerja asing untuk memenuhi kebutuhan spesifik mereka (Hayakawa, 2019).

Merespons krisis ketenagakerjaan yang terjadi di Jepang, MNC Jepang berupaya mendorong relaksasi kebijakan imigrasi bagi tenaga kerja asing melalui amandemen UU kontrol imigrasi dan pengakuan pengungsi pada tahun 2018. Perubahan UU ini menghasilkan kebijakan visa baru bagi pekerja asing, di mana pemerintah Jepang memperkenalkan dua jenis visa baru, yakni visa kerja spesifik dan visa pelatihan. Keduanya dirancang untuk menarik pekerja asing dengan keterampilan khusus untuk memenuhi kekosongan tenaga kerja dalam sektor-sektor vital bagi pertumbuhan ekonomi Jepang, seperti konstruksi, perawatan, dan teknologi (Iklima et al., 2021; Wakisaka & Cardwell, 2021).

Meskipun berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan inovasi teknologi, pengaruh MNC terhadap kebijakan imigrasi juga menimbulkan beberapa isu sosial

dan ekonomi yang penting. Kritik sering kali ditujukan pada risiko bahwa prioritas kepentingan bisnis dapat mengabaikan aspek sosial, seperti integrasi pekerja asing ke dalam masyarakat Jepang atau perlindungan terhadap hak-hak mereka. Terdapat kekhawatiran bahwa peningkatan jumlah pekerja asing dapat memengaruhi pasar tenaga kerja lokal, terutama dalam konteks pengupahan dan kondisi kerja (Komine, 2018; Vogt, 2007).

Selain itu, ada risiko bahwa MNC dapat memanfaatkan kebijakan imigrasi untuk kepentingan jangka pendek mereka, tanpa memperhatikan dampak jangka panjang terhadap masyarakat lokal. Hal ini dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi keuntungan ekonomi, di mana MNC mendapatkan keuntungan ekonomi yang signifikan tanpa kontribusi yang proporsional terhadap masyarakat atau lingkungan setempat (OECD, 2023). Menghadapi tantangan *aging population* dan kebutuhan akan tenaga kerja asing, penting bagi Jepang untuk mencari keseimbangan yang tepat antara mendukung pertumbuhan ekonomi melalui investasi MNC dan memastikan keadilan sosial serta keberlanjutan lingkungan. Kolaborasi yang lebih erat antara sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil dapat membantu mengoptimalkan manfaat dari kehadiran pekerja asing di samping memitigasi risiko sosial dan ekonomi yang ditimbulkan (Vogt, 2007).

Amandemen UU Pengendalian Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi di Jepang telah memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek terutama sosial, ekonomi, budaya, dan politik di negara ini, terutama dalam konteks mengatasi tantangan *aging population* dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor vital. Amandemen ini, yang memperkenalkan visa baru untuk pekerja asing terampil, secara langsung dipengaruhi oleh permintaan dan dukungan dari MNC terutama otomotif dan elektronik serta sektor industri lainnya. Secara ekonomi, amandemen ini telah memberikan dorongan signifikan bagi pertumbuhan sektor-sektor tertentu yang menghadapi kekurangan tenaga kerja. Misalnya, sektor konstruksi dan

manufaktur di Jepang telah mendapatkan manfaat dari kedatangan pekerja asing yang membantu mengisi kekosongan tenaga kerja yang sulit diisi secara lokal. Peningkatan investasi asing langsung dari MNC juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional dan nasional (Theresia, 2024).

Peran Perusahaan Multinasional dalam Memengaruhi Amandemen Undang-Undang Imigrasi Tenaga Kerja Asing di Jepang

MNC Jepang, terutama yang bergerak di sektor otomotif dan elektronik seperti Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Sony, Panasonic, Hitachi, dan lain-lain, memainkan peran sentral dalam perekonomian global, tidak hanya melalui ekspansi bisnis, melainkan juga melalui pengaruh mereka terhadap kebijakan domestik di Jepang. Salah satu bidang di mana pengaruh ini paling terlihat adalah dalam amandemen UU Imigrasi Tenaga Kerja Asing. Mengingat pentingnya tenaga kerja yang fleksibel dan produktif bagi keberhasilan operasi global mereka, sederet MNC Jepang memiliki kepentingan dalam membentuk kebijakan tenaga kerja yang mendukung kebutuhan bisnis mereka. Amandemen ini merupakan momentum yang tepat bagi mereka untuk terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses perubahan UU Imigrasi Tenaga Kerja Asing melalui penggunaan berbagai bentuk instrumen kekuasaan, yang mencakup kekuasaan instrumental, kekuasaan struktural, dan kekuasaan diskursif.

Kekuasaan Instrumental

Sederet MNC Jepang memiliki pengaruh yang kuat dalam berbagai aspek ekonomi dan politik di Jepang, termasuk dalam pembentukan kebijakan publik. Kekuatan ini berasal dari sejumlah faktor kunci yang saling terkait, yang memperkuat posisi mereka sebagai pemain utama dalam perekonomian nasional dan global. Pada umumnya kepentingan MNC di Jepang akan ditampung dalam

suatu wadah atau sebuah organisasi bisnis yang familiar disebut sebagai *Keidanren*. *Keidanren* merupakan federasi bisnis terbesar di Jepang (*Japan Business Federation*) dan merupakan salah satu aktor bisnis paling berpengaruh kuat. Organisasi ini terdiri atas 1.542 perusahaan perwakilan Jepang termasuk MNC, 106 asosiasi industri nasional, dan organisasi ekonomi regional di 47 prefektur (per 1 April 2024), termasuk di antaranya sederet MNC seperti Honda, Toyota, Nissan, Mitsubishi, Sony, Panasonic, Hitachi, dan lain-lain. Hal ini menjadikan *Keidanren* memiliki pengaruh yang begitu besar. Pengaruh *Keidanren* dalam perwakilan perusahaan swasta untuk merumuskan kebijakan publik sangat signifikan. Sebagai representasi utama dari kepentingan bisnis, *Keidanren* memiliki akses langsung ke pembuat kebijakan dan sering kali dilibatkan dalam konsultasi mengenai berbagai isu ekonomi dan regulasi yang secara tidak langsung merepresentasi kepentingan bisnis terutama MNC yang berbasis di Jepang (Keidanren, 2024; Vogt, 2007).

Keidanren memainkan peran kunci dalam memengaruhi kebijakan publik melalui pengaruh politik secara langsung. Organisasi ini secara rutin mengadakan pertemuan dengan para politisi dan pejabat birokrasi pemerintah, termasuk anggota parlemen dan menteri terkait, untuk mendiskusikan kebijakan ketenagakerjaan. Hubungan erat antara *Keidanren* dan pemerintah memungkinkan mereka untuk melobi secara efektif demi kepentingan anggotanya. Mereka memiliki akses yang luas ke pembuat kebijakan, yang memfasilitasi proses advokasi. Selain lobi dan advokasi langsung, *Keidanren* juga menggunakan kekuatan jaringan anggotanya untuk membangun tekanan kolektif. Perusahaan-perusahaan besar sekaliber MNC yang tergabung dalam *Keidanren* memiliki pengaruh ekonomi yang signifikan, yang dapat digunakan untuk mendukung atau menentang kebijakan tertentu. Koordinasi aksi kolektif ini menjadikan pandangan dan kepentingan *Keidanren* sulit diabaikan oleh pemerintah (Iftinchi & Gheorghe, 2018).

Tak hanya itu, koneksi politik yang terjalin antara *Keidanren* dengan Shinzo Abe selaku Perdana Menteri Jepang sangat erat dan berdampak pada arah kebijakan ekonomi selama masa jabatannya. Abe dikenal dengan kebijakan ekonominya yang disebut *Abenomics*, yang terdiri dari tiga doktrin utama, yaitu pelonggaran moneter, stimulus fiskal, dan reformasi struktural. *Keidanren* mendukung banyak aspek dari *Abenomics*, terutama upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui reformasi regulasi dan peningkatan daya saing MNC Jepang. Kolaborasi ini membantu memperkuat hubungan antara dunia bisnis dan pemerintahan, serta memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan sejalan dengan kepentingan MNC Jepang (Botman et al., 2015).

Selama masa kepemimpinan Abe, *Keidanren* juga berperan dalam mendukung reformasi ketenagakerjaan yang bertujuan untuk membuat pasar tenaga kerja Jepang lebih fleksibel dan kompetitif. Mereka mendukung upaya untuk mengurangi regulasi yang menghambat bisnis dan memperkenalkan kebijakan yang mempromosikan inovasi dan investasi. Sebagai contoh, *Keidanren* mendorong perubahan dalam UU tenaga kerja untuk mempermudah perusahaan dalam merekrut dan mempekerjakan pekerja paruh waktu dan kontrak, serta mendukung inisiatif untuk meningkatkan partisipasi tenaga kerja wanita dan pekerja senior dalam ekonomi (Botman et al., 2015).

MNC juga memengaruhi kebijakan imigrasi melalui partisipasi aktif dalam dialog dengan pemerintah dan otoritas regulasi. Perusahaan-perusahaan ini sering kali memiliki perwakilan dalam kelompok advokasi industri atau forum dialog dengan pemerintah di tingkat nasional dan lokal. Melalui keanggotaan mereka dalam kelompok kepentingan ini, MNC dapat berkontribusi pada pembentukan kebijakan yang memengaruhi ketersediaan dan kondisi kerja pekerja asing di Jepang. Misalnya, MNC dalam sektor teknologi memengaruhi kebijakan tentang visa kerja untuk spesialis dalam bidang teknologi informasi, sementara perusahaan dalam

sektor manufaktur mendorong pemerintah untuk menyederhanakan proses perekrutan pekerja asing untuk industri mereka. Partisipasi aktif ini memungkinkan MNC untuk menyuarakan kepentingan mereka secara langsung kepada pembuat kebijakan, yang mengarah pada perubahan atau reformasi kebijakan imigrasi yang lebih mendukung kebutuhan bisnis mereka (Keidanren, 2024; Vogt, 2007; Widarahesty & Ayu, 2014).

Selama Abe berkuasa, *Keidanren* berhasil memengaruhi sejumlah reformasi ketenagakerjaan, termasuk perubahan pada UU kerja paruh waktu dan perbaikan kondisi kerja untuk pekerja non-reguler (Botman et al., 2015). Dukungan dari *Keidanren* membantu Abe dalam mewujudkan reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas pasar tenaga kerja Jepang, meskipun terkadang mendapat kritik karena dianggap mengurangi perlindungan bagi pekerja. Dengan berbagai instrumen kekuatan yang dimilikinya, *Keidanren* terus memainkan peran kunci dalam pembentukan kebijakan ketenagakerjaan di Jepang. Kolaborasi strategis dengan pemerintah, terutama selama era pemerintahan Abe, menunjukkan bagaimana *Keidanren* sebagai representasi MNC di Jepang dapat memengaruhi regulasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kepentingan korporasi, di sisi lain tetap menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kepentingan pekerja dan bisnis (Botman et al., 2015; The Japan Times, 2024).

Kekuasaan Struktural

MNC mampu memengaruhi ditetapkan suatu kebijakan tanpa melalui lobi politik karena kemampuan intrinsik yang dimiliki sebagai entitas ekonomi yang menguasai pilihan lokasi bisnis yang berhubungan dengan situasi lapangan terkait perdagangan perusahaan di tingkat internasional. Dalam konteks peran MNC Jepang dalam memengaruhi amandemen kebijakan pengawasan imigrasi terkait tenaga kerja asing, perlu terlebih dahulu memahami kedudukan MNC Jepang dalam

proses penetapan amandemen kebijakan tersebut. Kenyataan bahwa Jepang dalam beberapa dekade terakhir tengah berupaya keluar dari kondisi stagnansi ekonomi yang salah satu faktornya disebabkan oleh kekurangan tenaga kerja akut yang menggerogoti berbagai sektor penting perekonomiannya sebagai implikasi permasalahan *aging population*, menjadi landasan utama Abe selaku Perdana Menteri Jepang mengambil langkah untuk melakukan amandemen kebijakan pelonggaran imigrasi. Amandemen tersebut bertujuan untuk menarik masuknya suplai tenaga kerja asing sehingga permasalahan krisis tenaga kerja dapat teratasi dan mampu meningkatkan produktivitas industri di Jepang dalam rangka mengeluarkan Jepang dari stagnansi ekonomi (East Asia Forum, 2023).

Permasalahan lain yang dihadapi oleh Jepang terkait landasan dilakukannya amandemen kebijakan ini adalah permasalahan tingginya upah minimum pekerja di Jepang yang diakibatkan oleh tingginya permintaan tenaga kerja di berbagai sektor industri vital seperti industri manufaktur dan konstruksi yang bertolak belakang dengan ketersediaan tenaga kerja yang sangat minim. Berbagai permasalahan perekonomian tersebut, menjadikan Abe beserta kabinetnya mengambil langkah untuk mengamandemen kebijakan pelonggaran imigrasi untuk memenuhi suplai kebutuhan tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas ekonomi Jepang (Okina, 2023).

Pengentasan permasalahan krisis tenaga kerja akut di Jepang pada perkembangannya juga melibatkan berbagai MNC Jepang yang tergabung dalam *Keidanren* untuk meningkatkan produktivitas perekonomian Jepang dengan melakukan investasi di bidang sumber daya manusia sebagai respons mereka terhadap implikasi menurunnya produktivitas perekonomian Jepang. Sejumlah MNC yang tergabung dalam keanggotaan *Keidanren*, seperti Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, dan 1000-an perusahaan lain, akhirnya mengambil langkah melakukan revitalisasi dan reformasi sistem pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka

meningkatkan pengembangan dan daya tarik terhadap calon-calon tenaga kerja, termasuk tenaga kerja asing guna menyeimbangkan angka kebutuhan tenaga kerja yang tinggi dengan jumlah ketersediaan tenaga kerja sehingga nilai upah pekerja di Jepang menjadi lebih menguntungkan bagi operasional produksi perusahaan (Japan Productivity Center, 2022).

Keberadaan *Keidanren* sebagai federasi bisnis terbesar di Jepang yang terdiri dari gabungan lebih seribu perusahaan yang di dalamnya mencakup MNC raksasa Jepang dan pengejaran kepentingan ekonomi terkait peningkatan produktivitas bisnis, menempatkan mereka dapat memengaruhi keputusan amandemen kebijakan pelonggaran imigrasi oleh pemerintah Jepang. Peran MNC Jepang dalam memengaruhi amandemen UU pelonggaran imigrasi di Jepang menggunakan tipologi *structural power* terlihat melalui penguasaan situasi lapangan terkait ekonomi perdagangan perusahaan di tingkat internasional yang dimilikinya. Berbekal penguasaan arus informasi situasi lapangan tersebut, melalui *Keidanren*, mereka kemudian menyatakan dukungannya terhadap pengesahan amandemen UU pelonggaran imigrasi yang sejalan dengan kepentingan mereka dalam mengatasi permasalahan krisis tenaga kerja (Milly, 2020). Di lain sisi, usulan pemerintah di bawah kepemimpinan Abe untuk mengamandemen UU imigrasi mendapatkan kritik dan penolakan dari kubu oposisi yang konservatif. Sebagaimana diketahui, Jepang sejak awal menerapkan kebijakan pengendalian imigrasi yang sangat ketat dan tidak memandang kebijakan pelonggaran imigrasi sebagai langkah konkret dalam mengatasi stagnasi perekonomian yang salah satu penyebabnya adalah krisis tenaga kerja (Milly, 2020).

MNC memiliki peran sentral dalam ekonomi dan mendominasi beberapa sektor industri. Ketergantungan pemerintah Jepang terhadap investasi dan inovasi dari MNC memosisikan mereka memiliki kekuasaan yang lebih besar dalam merumuskan kebijakan, termasuk amandemen UU imigrasi. Struktur ekonomi di

Jepang yang membutuhkan tenaga kerja asing untuk mengimbangi penurunan angka kelahiran dan peningkatan usia penduduk semakin menguatkan posisi MNC. Pemerintah Jepang menyadari bahwa perubahan kebijakan imigrasi tidak hanya dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pasar tenaga kerja, tetapi juga untuk mempertahankan daya saing industri di pasar global. Di sinilah kekuasaan struktural MNC sangat terlihat, karena keputusan mereka dapat langsung memengaruhi arah dan desain kebijakan imigrasi (Song, 2020).

Penggunaan kekuatan struktural oleh MNC yang mencakup kekuatan intrinsik berupa kekuasaan berdasarkan lokasi bisnis perusahaan yang mampu mengendalikan manajemen risiko terkait operasional lapangan perusahaan yang berkaitan dengan agenda kebijakan. Sehingga, penggunaan kekuatan struktural dalam memengaruhi amandemen kebijakan tersebut tidak hanya dilakukan oleh perusahaan induk yang berada di Jepang, melainkan juga dilakukan oleh jaringan perusahaan yang berada di negara-negara yang hendak dijadikan target penarikan tenaga kerja asing seperti negara di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut terlihat dari dukungan yang diberikan oleh sedikitnya 730 perusahaan Jepang yang tergabung dalam *The Jakarta Japan Club* yang diwakili oleh MNC raksasa Jepang seperti Panasonic, Toyota, dan Befa melalui program pemagangan dan vokasi yang secara tidak langsung merupakan bentuk implementasi dari amandemen UU pelonggaran imigrasi (Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2020).

Kekuasaan Diskursif

Pemberlakuan UU baru terkait imigrasi di Jepang mencerminkan tidak hanya kebutuhan untuk mengatasi masalah demografis dan penyusutan tenaga kerja, tetapi juga cara perusahaan-perusahaan besar sekaliber MNC untuk membentuk wacana yang mendukung keberlangsungan bisnis mereka di tengah ancaman *aging population* terhadap produktivitas bisnis mereka (Song, 2020).

MNC, dengan kekuasaan ekonomi dan pengaruh politik yang signifikan, memainkan peran kunci dalam memengaruhi aturan-aturan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Mereka mencoba membangun narasi dengan memanfaatkan data dan argumen yang berbasis pada efisiensi ekonomi untuk mendukung kebijakan yang lebih ramah terhadap imigrasi. Dalam konteks Jepang, di mana populasi mengalami penurunan dan penuaan, MNC berargumen bahwa keterbukaan terhadap tenaga kerja asing tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi tetapi juga membantu memitigasi krisis demografis yang semakin memburuk. Melalui lobi-lobi sektor privat, mereka mengedepankan narasi yang menekankan pentingnya imigrasi untuk menyokong kebutuhan industri. Mereka menyampaikan pandangan bahwa sebagian besar sektor, termasuk teknologi, konstruksi, dan layanan kesehatan, sangat bergantung pada keterampilan dan kontribusi tenaga kerja asing. Strategi ini, yaitu menciptakan diskursus yang menempatkan imigrasi dalam konteks kebutuhan ekonomi Jepang, memicu respons positif dari pemerintah dan pembuat kebijakan. Hal ini terlihat jelas dalam proses legislasi yang melahirkan amandemen UU imigrasi, di mana argumen tentang kebutuhan tenaga kerja sering kali menjadi titik tekan perdebatan (Song, 2020).

Kesuksesan strategi diskursif ini tidak terlepas dari kemampuan perusahaan-perusahaan tersebut untuk membangun aliansi dengan aktor-aktor kunci dalam pemerintah. Mereka mengorganisasi seminar, forum, dan diskusi dengan menyajikan bukti-bukti empiris mengenai kontribusi tenaga kerja asing bagi ekonomi Jepang. Alur diskursus yang dibangun menciptakan pandangan bersama yang mendukung ide bahwa imigrasi adalah solusi yang rasional untuk masalah yang dihadapi Jepang. Ketika pandangan tersebut menjadi dominan di ranah publik, amandemen UU imigrasi pun menjadi lebih mungkin untuk disetujui (Shimasawa & Oguro, 2010).

Kecenderungan MNC untuk mendominasi wacana ini dapat mendorong perubahan sosial yang lebih luas. Melalui penguatan narasi positif tentang kontribusi tenaga kerja asing, terdapat potensi untuk meruntuhkan stigma yang melekat pada imigran. Pendidikan publik dan kampanye kesadaran yang mulai muncul merupakan bagian dari strategi yang lebih luas dilakukan untuk menjadikan imigrasi sebagai topik yang tidak hanya dipahami dari sudut pandang ekonomi, tetapi juga sebagai isu kemanusiaan dan sosial (Akashi, 2014).

Di Jepang, di mana budaya kerja yang keras dan homogenitas kultural lebih diutamakan, narasi yang dibangun oleh MNC mengenai pentingnya tenaga kerja asing dapat menjadi instrumen yang ampuh untuk mendorong perubahan kebijakan. MNC Jepang seperti Sony, Toyota, dan Nissan, yang beroperasi di berbagai sektor, telah memperlihatkan kepentingan yang signifikan dalam memperjuangkan akses yang lebih besar terhadap tenaga kerja asing. Mereka menyadari bahwa keterbatasan dalam pasokan tenaga kerja lokal dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan daya saing mereka di pasar global. Dalam hal ini, mereka mulai mengembangkan dialog publik yang menekankan peran vital tenaga kerja asing dalam menjaga inovasi dan meningkatkan produktivitas (Botman et al., 2015).

Salah satu contoh konkret dari strategi kekuasaan diskursif ini adalah bagaimana MNC Jepang berkolaborasi dengan lembaga penelitian dan universitas untuk memproduksi studi-studi yang memaparkan manfaat imigrasi tenaga kerja asing. Melalui publikasi tersebut, mereka berupaya membangun narasi bahwa tenaga kerja asing bukanlah ancaman bagi pekerjaan lokal, melainkan pelengkap yang akan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Dalam konteks ini, perusahaan-perusahaan tersebut berperan sebagai agen perubahan yang berusaha membentuk pemahaman masyarakat tentang imigrasi (Akashi, 2014).

Peran dukungan *Keidanren* sebagai federasi bisnis terbesar yang keanggotaannya diisi oleh berbagai MNC raksasa yang berbasis di Jepang berhasil meloloskan pengesahan amandemen UU pelonggaran imigrasi Jepang dan meredam penolakan kubu oposisi. Dukungan federasi bisnis terbesar Jepang yang didasari oleh kepentingan ekonomi perusahaan mampu memengaruhi terjadinya amandemen melalui kekuatan diskursif yang dimiliki. *Keidanren* menerbitkan sebuah laporan berdasarkan pada arus informasi data-data lapangan yang tidak dimiliki oleh pemerintah Jepang yang pada intinya mendesak pemerintah Jepang untuk mempertimbangkan kebijakan pelonggaran imigrasi sebagai solusi atas penyelesaian penyusutan tenaga kerja akibat *aging population*. Selain itu, secara tegas, *Keidanren* juga merilis rekomendasi kebijakan secara spesifik kepada pemerintah Jepang yang ditujukan untuk sejumlah industri yang mengalami krisis ketenagakerjaan sehingga memerlukan ketersediaan tenaga kerja asing. Rekomendasi kebijakan ini diinkorporasi dan diadopsi ke dalam revisi UU Kontrol Imigrasi dan Pengakuan Pengungsi pada tahun 2018. Hal ini mencerminkan keberhasilan MNC Jepang dalam menarasikan positif isu tenaga kerja asing sehingga mampu diterima publik secara luas dan diadopsi dalam kebijakan pelonggaran imigrasi bagi pekerja asing (Song, 2020; Vogt, 2007).

KESIMPULAN

MNC memiliki peran sentral dalam ekonomi Jepang melalui investasi, teknologi canggih, dan pengaruh politik terhadap kebijakan pemerintah. Mereka membantu mengatasi kekurangan tenaga kerja akibat *aging population* melalui penerimaan pekerja asing, yang didorong oleh permintaan terhadap tenaga kerja terampil dari luar negeri. Meskipun memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh MNC juga menimbulkan tantangan sosial dan budaya, seperti integrasi pekerja asing dan ketegangan di masyarakat.

Pengaruh MNC Jepang, terutama melalui *Keidanren*, tidak hanya mencakup pengaruh politik langsung dan advokasi kebijakan, tetapi juga memengaruhi narasi dan diskursus seputar kebijakan ketenagakerjaan di Jepang. Melalui *Keidanren*, MNC menjalankan kekuasaan instrumental yang dimiliki dalam memengaruhi kebijakan imigrasi tenaga kerja asing di Jepang. Mereka memanfaatkan dominasi atas informasi ekonomi dan perdagangan internasional untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang menguntungkan kepentingan bisnis mereka, seperti mendukung amandemen kebijakan pelonggaran imigrasi untuk mengatasi krisis tenaga kerja.

Kolaborasi dengan pemerintah, terutama selama era Perdana Menteri Abe, memperkuat posisi mereka dalam memfasilitasi pengesahan kebijakan tersebut meskipun menghadapi penolakan dari kubu oposisi. Di tingkat regional, mereka juga menggunakan jaringan internasional seperti *The Jakarta Japan Club* untuk mendukung implementasi kebijakan di luar Jepang, menunjukkan bagaimana kekuasaan struktural mereka memiliki dampak yang signifikan dalam dinamika politik internasional. MNC juga membentuk dan memperkuat gagasan serta kerangka yang memengaruhi perubahan kebijakan imigrasi bagi tenaga kerja asing di Jepang. Kemampuan ini muncul atas kontrol mereka terhadap narasi dan pandangan yang mendominasi diskursus domestik dan global, terutama dalam konteks pembangunan berkelanjutan melalui pembentukan aliansi dan norma yang memengaruhi kebijakan dan praktik komunikatif, mengintegrasikan nilai budaya serta memengaruhi arus informasi global terkait pentingnya tenaga kerja asing sebagai solusi atas penyusutan tenaga kerja akibat *aging population* yang menggerogoti produktivitas bisnis MNC Jepang.

BIBLIOGRAFI

Akashi, J. (2014). New Aspects of Japan's Immigration Policies: Is Population Decline Opening the Doors? *Contemporary Japan*, 26(2), 175–196. <https://doi.org/10.1515/cj-2014-0009>

-
- Botman, D., Danninger, S., & Schiff, J. (2015). *Can Abenomics Succeed?: Overcoming the Legacy of the Lost Decades*. International Monetary Fund. <https://doi.org/10.5089/9781498324687.071>
- Colacelli, M., & Corugedo, E. F. (2018). Macroeconomic Effects of Japan's Demographics: Can Structural Reforms Reverse Them? *IMF Working Papers*, 2018/248, 1–43. <http://dx.doi.org/10.5089/9781484384732.001>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2022). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Davison, J., & Peng, I. (2021). Views on immigration in Japan: Identities, interests, and pragmatic divergence. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 47(11), 2578–2595. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2020.1862645>
- East Asia Forum. (2023). *Why Won't Kishida Adopt a Formal Immigration Policy?* <https://eastasiaforum.org/2023/11/23/why-wont-kishida-adopt-a-formal-immigration-policy/>
- Fauzan, M. R., & Paramasatya, S. (2022). Upaya Jepang dalam Melindungi Tenaga Kerja Asing Pada Technical Intern Training Program. *Journal of International Relations Diponegoro*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.14710/jirud.v8i2.33575>
- Fitzgerald, R. (2023). *Japanese Multinational Companies in the Global Economy: Strategies, Management and Capabilities*. Global EDGE.
- Frendy. (2022). The relevance of keiretsu affiliation on disclosure quality in contemporary Japanese economy. *Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics*, 29(6), 1579–1599. <https://doi.org/10.1080/16081625.2020.1726191>
- Ganelli, G. (2015). Foreign Help Wanted: Easing Japan's Labor Shortages. *IMF Working Papers*, 15(181), 1. <https://doi.org/10.5089/9781513530642.001>
- Garceau, O. (2015). Interest Group Theory in Political Research. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 319(1), 1–10. <https://doi.org/10.1177/000271625831900112>
- Hayakawa, C. (2019). Japan's recent dynamic developments in immigration law and policy. *Revue de Droit Comparé Du Travail et de La Sécurité Sociale*, 4, Article 4. <https://doi.org/10.4000/rdctss.1364>
- Iftinchi, V., & Gheorghe, H. (2018). How Multinational Corporations Use Lobbying and Advocacy to Mitigate Political Risks. *Oradea Journal of Business and Economics*, 3, 18–26. <https://doi.org/10.47535/1991ojbe040>
- Iklima, A. L., Yuliati, Y., & Chawa, A. F. (2021). Between Halal and Haram: The Challenges and Adaptation of Halal Dietary Consumption Indonesian Muslim Immigrants in Japan. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 7(2), 109–122. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v7i2.4660

-
- Isaac, K. S., Ibidunni, A., Kehinde, O. J., Ufua, D., Elizabeth, K. B., Oyo-Ita, D., & Mathias, C. M. (2020). The Role of Multinational Corporations in Global Economic Practice: Literature Review. *Journal of Management Information and Decision Sciences*, 23(5), 1–10.
- Japan Productivity Center. (2022). *Survey Results Regarding “Wages that Maximize Human Resources.”*
- Kajimoto, T. (2022). *More Japanese firms are raising wages to combat labour shortage: Reuters poll.* Reuters.
- Keidanren. (2024). *About Keidanren.*
<https://www.keidanren.or.jp/en/profile/pro001.html>
- Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2020). *Ratusan Perusahaan Jepang Dukung Program Pemagangan Kemnaker.*
<https://kemnaker.go.id/news/detail/ratusan-perusahaan-jepang-dukung-program-pemagangan-kemnaker>
- Kensy, R. (2001). Keiretsu: Japanese Multinational Enterprises and the Postmodern. In *Keiretsu Economy—New Economy?: Japan’s Multinational Enterprises from a Postmodern Perspective* (pp. 173–260). Palgrave Macmillan UK.
https://doi.org/10.1057/9780333985687_5
- Kim, I. S., & Milner, H. V. (2021). Multinational Corporations and their Influence Through Lobbying on Foreign Policy. In *Global Goliaths: Multinational Corporations in a Changing Global Economy* (pp. 497–536). The Brookings Institution. <https://www.brookings.edu/books/global-goliaths/>
- Komine, A. (2018). A Closed Immigration Country: Revisiting Japan as a Negative Case. *International Migration*, 56(5), 106–122. <https://doi.org/10.1111/imig.12383>
- Lanzieri, G. (2013). *Long-Term Contribution of Migration in Ageing Populations: Japan Compared with Europe.* Publications Office of the European Union.
<http://dx.doi.org/10.2785/29184>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook.* SAGE Publications.
- Milly, D. J. (2020). *Japan’s Labor Migration Reforms: Breaking with the Past?* Migratopm Policy.
- Morales, N. (2023). High-Skill Migration, Multinational Companies and the Location of Economic Activity. *The Review of Economics and Statistics*, 1–45.
https://doi.org/10.1162/rest_a_01327
- Muto, I., Oda, T., & Sudo, N. (2016). Macroeconomic Impact of Population Aging in Japan: A Perspective from an Overlapping Generations Model. *IMF Economic Review*, 64(3), 408–442. <https://doi.org/10.1057/imfer.2016.6>

-
- National Institute of Population and Social Security Research. (2010). *Population Projections for Japan (2016-2065): Summary*.
- NHK World Japan. (2018). *What's at Stake: Inside Shinzo Abe's Efforts to Bring More Foreign Workers into Japan*.
<https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/302/>
- OECD. (2023). *Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2023: Strengthening Property Taxation in Asia*. Organisation for Economic Co-operation and Development.
https://www.oecd-ilibrary.org/taxation/revenue-statistics-in-asia-and-the-pacific-2023_e7ea496f-en
- Ogawa, N. (2011). Population Aging and Immigration in Japan. *Asian and Pacific Migration Journal*, 20(2), 133–167. <https://doi.org/10.1177/011719681102000202>
- Okina, Y. (2023). *Japan's new vision for economic growth*. East Asia Forum.
<https://doi.org/10.59425/eabc.1693087212>
- Pratiwi, H. D. K. (2014). *Kebijakan Pengendalian Imigrasi Sebagai Opsi Strategis Terhadap Fenomena Penuaan Populasi di Jepang*. 3(3), 1181–1198.
- Ruggie, J. G. (2018). Multinationals as Global Institution: Power, Authority and Relative Autonomy. *Regulation & Governance*, 12(3), 317–333.
<https://doi.org/10.1111/rego.12154>
- Shimasawa, M., & Oguro, K. (2010). Impact of Immigration on the Japanese Economy: A Multi-Country Simulation Model. *Journal of the Japanese and International Economies*, 24(4), 586–602. <https://doi.org/10.1016/j.jjie.2010.05.002>
- Sholihin, F. (2022). Global Migration sebagai Solusi Jepang dalam Menghadapi Aging Population melalui the Immigration Control and Refugee Recognition Act. *Jurnal Transborders*, 6(1), 50–62.
- Song, J. (2020). The Political Dynamics of Japan's Immigration Policies during the Abe Government. *Pacific Focus*, 35(3), 613–640.
<https://doi.org/10.1111/pafo.12172>
- Statista. (2023). *Share of private companies experiencing a labor shortage of regular full-time employees in Japan as of November 2023, by industry*. Statista.
- The Japan Times. (2024). *Keidanren to Propose Policy on Foreign Workers*. The Japan Times.
<https://www.japantimes.co.jp/business/2024/05/31/keidanren-chairman/>
- Theresia, Y. (2024). Dilema Fenomena Shoushika Tahun 2020-2023: Antara Kebijakan Imigrasi dan Pelanggaran HAM di Jepang. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v5i1.2454>

-
- Vogt, G. (2007). *Closed Doors, Open Doors, Doors Wide Shut?: Migration Politics in Japan*. 15, 3–30. <https://www.dijtokyo.org/wp-content/uploads/2016/09/20071001ja-Studie-Vogt.pdf>
- Wakisaka, D., & Cardwell, P. J. (2021). Exploring the Trajectories of Highly Skilled Migration Law and Policy in Japan and the UK. *Comparative Migration Studies*, 9(1), 43. <https://doi.org/10.1186/s40878-021-00251-3>
- Widarahesty, Y., & Ayu, R. (2014). Perkembangan Peran dan Fungsi Zaibatsu (Kongsi Dagang) dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Jepang Sebelum PD II Sampai Pasca PD II. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 1(4), Article 4. <https://jurnal.uai.ac.id/index.php/SPS/article/view/76>
- Yaginuma, H. (1993). The Keiretsu Issue: A Theoretical Approach. *Japanese Economic Studies*, 21(3), 3–48. <https://doi.org/10.2753/JES1097-203X21033>